

# **KAJIAN PENGGUNAAN PUPUK SUBSIDI DAN NON SUBSIDI DI DESA KEPALA SUNGAI, KECAMATAN SECANGGANG, KABUPATEN LANGKAT**

**Rahmi Dwi Handayani Rambe<sup>1</sup>, Rahmad Setia Budi<sup>2</sup>**  
**Fakultas Pertanian**  
**Program Studi Agroekoteknologi**  
**Universitas Islam Sumatera Utara**

## **ABSTRACT**

Keywords :

Fertilizer, subsidized, non  
subsidized

Fertilizer is one of the important inputs in increasing the productivity of food crops, so that its existence and utilization has a strategic position. One of the policies in the procurement of fertilizers is fertilizer subsidies. Fertilizer subsidies have long been implemented with various policies that follow it, such as policies on fertilizer procurement, distribution of fertilizers and supervision of subsidized fertilizers. The problem faced is that local people do not know which are subsidized and non-subsidized fertilizers. So that with this extension, the Kepala Sungai community can find out the type and method of obtaining the fertilizer. This PKM activity has added insight from the local community in knowing which fertilizers are subsidized and non-subsidized, although there are some things that still need to be improved for the progress of agriculture in the future. In Indonesia, the distribution of fertilizer subsidies is currently still constrained. These deviations include incomplete RDKK data collection, distribution of subsidized fertilizers to unauthorized parties, lack of distribution volume that causes a shortage of fertilizers, procurement and distribution of subsidized fertilizers by the fertilizer industry, obstacles in calculating fertilizer subsidies, and supervision of subsidized fertilizer distribution. Most of the deviations in the implementation of subsidized fertilizer program policies occur at the retailer, distributor and producer level as well as the weak mechanism for monitoring the implementation of subsidized fertilizers. Aspects of transparency and information disclosure in the implementation chain of the subsidized fertilizer policy program are also still weak. The strategy for distributing or distributing subsidized fertilizers in Indonesia can be implemented through several distribution alternatives.

## **Pendahuluan**

Pupuk merupakan hal pokok yang harus tersedia dalam rangka pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman pada pertanian moderen. Pupuk memegang peranan penting, karena tanpa pupuk kegiatan usahatani yang dilakukan tidak akan sesuai harapan karena hasil (produksi) yang didapat tidak sesuai dengan keinginan pembudidaya (petani) yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan petani tersebut. Selain itu adanya kelangkaan yang diiringi dengan kenaikan harga pupuk mempengaruhi penyediaan pupuk bagi petani terjadi hampir setiap tahun. Pupuk merupakan kebutuhan pokok usahatani sehingga berapapun harganya akan tetap dibeli petani walaupun jumlah yang dibeli tidak seperti pada harga yang normal. Keadaan ini sangat berpengaruh pada tingkat pemakaian pupuk ditingkat usahatani.

Desa Kepala Sungai merupakan desa yang terletak di Kecamatan Secanggang Kota Stabat yang berkembang sebagai daerah jasa pertanian, perternakan, perdagangan, pemukiman dan lain-lain. Potensi daerah yang dimiliki desa kepala sungai, melalui kegiatan ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang menanamkan padi dan palawija, jadi untuk potensi yang dimiliki masyarakat sekitar cukup bagus, sebab sebagian besar produk dari tanaman tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Adapun tujuan kegiatan ini membantu masyarakat dalam mengenal pupuk yang merupakan subsidi dan yang bukan subsidi.

## Tinjauan Pustaka

Desa Kepala Sungai merupakan desa yang terletak di Kecamatan Secanggang Kota Stabat yang berkembang sebagai daerah jasa pertanian, perternakan, perdagangan, pemukiman dan lain-lain. Potensi daerah yang dimiliki desa kepala sungai, melalui kegiatan ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang menanamkan padi dan palawija, jadi untuk potensi yang dimiliki masyarakat sekitar cukup bagus, sebab sebagian besar produk dari tanaman tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Pupuk merupakan kebutuhan penting dan strategis dalam kegiatan budidaya pertanian guna mendapatkan produktifitas dan mutu hasil yang optimal. Sebagai akibat meningkatnya kebutuhan pupuk, maka pupuk menjadi komoditi yang menarik bagi pelaku usaha, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya jenis-jenis pupuk yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian. Pemupukan adalah penambahan bahan tersebut ke dalam tanah agar tanah menjadi lebih subur, oleh karena itu pemupukan pada umumnya diartikan sebagai penambahan zat hara tanaman ke dalam tanah. Pemupukan dalam arti luas sebenarnya juga termasuk penambahan bahan-bahan lain yang dapat memperbaiki sifat tanah, misalnya pemberian pasir pada tanah liat, penambahan tanah mineral pada tanah organik, pengapuran dan sebagainya. Pupuk adalah setiap bahan yang diberikan ke dalam tanah atau disemprotkan pada tanaman dengan menambah unsur hara yang diperlukan tanaman.[1]

Untuk meningkatkan penggunaan pupuk secara berimbang di tingkat petani, salah satu instrumen kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah pemberian subsidi harga pupuk. Dengan adanya subsidi harga pupuk, maka rasio harga pupuk terhadap harga hasil pertanian akan menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan tanpa subsidi [2]. Insentif harga ini selanjutnya akan mendorong penggunaan pupuk sampai suatu titik di mana produktivitas atau keuntungan akan mencapai titik maksimum. Melalui insentif itu pula produsen pertanian akan terdorong untuk menerapkan teknologi produksi yang lebih baik.

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang diperdagangkan dalam pengawasan pemerintah dan pengadaannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Untuk penyalurannya kepada petani, pupuk bersubsidi terkadang mempunyai kendala hingga sampai ke pengecer dikarenakan keterbatasan persediaan akibat tingginya tingkat permintaan pupuk, kebutuhan pupuk tersebut dapat di bantu oleh penyediaan pupuk non subsidi yang mana dalam kajian penelitian ini merupakan pupuk yang diperdagangkan secara bebas dan pengadaannya tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Dari permasalahan tersebut tidak sedikit para petani yang memilih untuk menggunakan pupuk tidak bersubsidi (non subsidi). Hal ini terjadi karena dalam pemasaran pupuk non subsidi tersebut jarang mengalami hambatan untuk dapat memasarkan produk ketangan petani, selain itu penyediaan pupuk non subsidi tersebut hanya melibatkan beberapa pihak antara lain produsen, distributor/ agen, pedagang dan konsumen tanpa menggunakan pengajuan defenitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) seperti yang dilakukan pada permintaan pupuk bersubsidi.[3]

Pupuk non subsidi memiliki harga jual yang tinggi di bandingkan dengan pupuk subsidi, tetapi harga jual yang tinggi itu bukan satu-satunya masalah yang utama bagi petani di lapangan. Petani-petani di lapangan sangat minim informasi mengenai pupuk non subsidi, maka dari itu petani hanya mengandalkan informasi yang di berikan oleh petugas pertanian lapangan (PPL) dari Dinas Pertanian. Sementara petugas pertanian lapangan hanya mendapat pelatihan-pelatihan dari dinas yang diselenggarakan oleh perusahaan yang menyediakan pupuk subsidi, biasa di sebut dengan kegiatan kerjasama dinas dengan perusahaan. Perusahaan yang menjadi produsen pupuk non subsidi jarang sekali berkoordinasi dengan instansi pemerintahan dalam hal pengenalan produk dan penyalurannya. Perusahaan tersebut lebih memilih langsung bekerjasama dengan perusahaan

perkebunan di lapangan, dalam hal penyaluran pupuk non subsidi. Tahapan proses keputusan pembelian dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian suatu produk.

Demikian penting dan strategisnya peranan pupuk dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sehingga pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya adalah subsidi pupuk.



**Gambar 1. Kantor Desa**

### **Metode**

Metode kegiatan dilakukan dengan teori dan pengarahan kepada warga setempat mengenal pupuk yang merupakan subsidi dan yang bukan subsidi. Dengan pengamatan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui pupuk yang mana merupakan pupuk subsidi dan non subsidi. Masalah yang disampaikan dalam metode ini seperti:

1. Manfaat penggunaan pupuk subsidi
2. Jenis-jenis pupuk
3. Bagaimana cara mendapatkan pupuk bersubsidi

Demikian penting dan strategisnya peranan pupuk dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman, sehingga memberikan pengetahuan dan masukkan dengan menggunakan pupuk bersubsidi, agar masyarakat setempat tidak sembarangan memberikan takaran atau mengaplikasikan pupuk ke tanaman.



**Gambar 2. Penanaman padi bersama masyarakat**



Gambar 3. Penyuluhan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi bersama masyarakat

### Hasil dan Pembahasan

Potensi daerah yang dimiliki Desa Kepala Sungai, melalui kegiatan ini dilihat dari banyaknya masyarakat setempat yang bercocok tanam padi dan palawija, jadi untuk potensi yang dimiliki masyarakat sekitar cukup bagus, karena sebagian besar produk dari tanaman tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga masyarakat belum mengetahui mana pupuk bersubsidi dan non subsidi.

Dalam konteks pembangunan pertanian, pupuk merupakan salah satu unsur penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usahatani. Menurut Hadi (2007), pupuk merupakan salah satu input sangat esensial dalam proses produksi pertanian. Disebut demikian karena tanpa pupuk, penggunaan input lainnya seperti benih unggul, air dan tenaga kerja hanya akan memberikan manfaat marjinal sehingga produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan rendah.[4]

Tingkat pemupukan cenderung bervariasi antarlokasi. Di sebagian lokasi petani terbiasa memberikan pupuk dengan dosis tinggi melebihi rekomendasi [5]. Penggunaan pupuk yang lebih tinggi atau kurang dari rekomendasi akan menurunkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk. Empat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk yaitu: 1) Tepat jenis, yaitu memilih kombinasi jenis pupuk berdasarkan komposisi unsur hara utama dan tambahan sesuai dengan sifat kelarutan, sifat sinergis dan antagonis antarunsur hara, dan sifat tanahnya. 2) Tepat waktu dan frekuensi, yaitu pemberian pupuk ditentukan oleh iklim/curah hujan, sifat fisik tanah, dan logistik pupuk. 3) Tepat cara, yaitu cara pemberian berdasarkan jenis pupuk, umur tanaman, dan jenis tanah. 4) Tepat dosis, yaitu dosis pupuk berdasarkan analisis status hara tanah dan kebutuhan tanaman. Penerapan empat tepat tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh perencanaan kebutuhan pupuk yang tepat dan rinci dari masing-masing petani atau kelompok tani. Untuk menyusun rencana kebutuhan pupuk dalam bentuk RDKK yang komprehensif, diperlukan informasi sebagai berikut: 1) rekomendasi pemupukan spesifik lokasi, 2) luas lahan dan pemiliknya, dan 3) komoditas yang diusahakan. Sebagian besar pangkalan data dan informasi tersebut belum tersedia secara lengkap, baik di tingkat daerah maupun pusat, sehingga penyusunan RDKK belum didasarkan pada data yang akurat dan terkini [6]. Alternatif perbaikan dalam penerapan ketepatan penggunaan pupuk yaitu meningkatkan intensitas sosialisasi sistem pemupukan berimbang spesifik lokasi dan pemanfaatan pupuk organik.

Demikian penting dan strategisnya peranan pupuk dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sehingga pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya adalah subsidi pupuk. Kebijakan pemberian subsidi pupuk telah berlangsung selama bertahun-tahun dan setiap tahun anggaran yang disediakan cenderung semakin lama semakin meningkat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan di antaranya adalah: kelangkaan pupuk di beberapa daerah sentra pertanian, penyelundupan pupuk ke luar negeri, lonjakan harga di atas HET, perembesan pupuk bersubsidi ke pasar non-subsidi dan antarwilayah [7].

Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik. Penyaluran pupuk yang disubsidi dilakukan oleh produsen pupuk yang ditugaskan Pemerintah yaitu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan anak perusahaannya yaitu: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik, melalui distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Guna pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi dimaksud, pada kemasan/kantong pupuk bersubsidi wajib diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah. Barang dalam Pengawasan” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus. Khusus untuk Pengawasan dan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi, mulai 1 Januari 2012 label tersebut berwarna merah muda (pink). Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor maupun oleh pengecer resmi. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Produsen, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan stok yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu adanya pengawasan melekat secara berjenjang dari produsen dan distributor.

Namun menjadi kendala dalam penggunaan pupuk bersubsidi adalah penentuan kios sebagai pengecer, karena ada yang ditentukan oleh kelompok tani, ada yang ditentukan melalui rekomendasi Dinas Pertanian atau Dinas Perdagangan dan ada yang ditentukan oleh distributor. Masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan, sehingga agar tidak menjadi rancu mestinya pemerintah membuat aturan yang jelas siapa yang menentukan kios pengecer. Atau, sebaliknya, mestinya ditentukan apa dasarnya kios pengecer ditentukan oleh kelompok tani, distributor atau Dinas Pertanian/Perdagangan.



**Gambar 4. Foto Bersama dengan Para Peserta Kegiatan PKM**

## **Kesimpulan**

Kegiatan PKM ini telah menambah wawasan dari masyarakat setempat dalam mengetahui yang merupakan pupuk bersubsidi dan non subsidi, meskipun ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki demi kemajuan pertanian kedepannya.

Di Indonesia, penyaluran subsidi pupuk saat ini masih terkendala. Penyimpangan tersebut antara lain belum lengkapnya pendataan RDKK, distribusi pupuk bersubsidi ke pihak yang tidak berhak, kurangnya volume penyaluran yang menimbulkan kelangkaan pupuk, pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi oleh industri pupuk, kendala penghitungan subsidi pupuk, serta pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

Sebagian besar penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan program pupuk bersubsidi terjadi di tingkat pengecer, distributor dan produsen serta lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan pupuk bersubsidi. Aspek transparansi dan keterbukaan informasi dalam mata rantai pelaksanaan program kebijakan pupuk bersubsidi juga masih lemah.

Strategi penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia dapat diterapkan melalui beberapa alternative penyaluran. Salah satu alternatif penyaluran tersebut antara lain penggunaan kartu melalui gapoktan, penyaluran subsidi pupuk melalui penggunaan kios Pupuk Indonesia Mart (secara mandiri) dan melalui penyaluran langsung kepada produsen pupuk di Indonesia.

## **Referensi**

- [1]. Leiwakabessy, W.H dkk. (1998). “Pupuk dan Pemupukan”. Jurusan Tanah. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- [2]. Kariyasa, K., M. Maulana, dan S. Mardianto (2004). “Usulan tingkat subsidi dan harga eceran tertinggi (HET) yang relevan serta perbaikan pola pendistribusian pupuk di Indonesia”.
- [3]. Darwis.V. dan C. Muslim (2007). Revitalisasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk dalam Mendukung Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Tingkat Petani”
- [4]. Hadi, P.U., dkk (2007) “Analisis Penawaran dan Permintaan Pupuk di Indonesia 2007 – 2012”.
- [5]. Rachman, B. and T. Sudaryanto (2010) “Impacts and future perspectives of fertilizer policy in Indonesia”
- [6]. Sudaryanto, T. dan B. Rachman (2009) “Dampak penyesuaian HET pupuk terhadap penggunaan pupuk dan laba usaha tani padi, jagung, kedelai”
- [7]. Kariyasa, K. dan Y. Yusdja (2005) “Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk Urea di Indonesia: Kasus Provinsi Jawa Bara”.